

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK INDONESIA DALAM PERSIMPANGAN IDEALISME VS EKONOMI POLITIK MEDIA

Nurul Adji Dwi Wulandari

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V

Email: ms_adji@rocketmail.com

Abstract

TVRI status changing into public service broadcasting, both for its central broadcast station and its local broadcast station in 2003 brought many significant changes in these oldest television broadcast station in Indonesia. One of the most significant changes that can be traced is on its funding system. As a public service broadcasting, TVRI was guaranteed to obtain the operational fund through the state or regional budget funding mechanism. The government also promised that TVRI will be given opportunity to operate like private broadcast station in order to gain maximal profit which has stated through government regulations and broadcasting acts. Inevitably consequent of this funding practice system, has put TVRI to always depend on government in order to operate daily. In the other hand, this funding system also will make TVRI gain a lot of profit and income commercially. These mixed funding systems indicate that there are political economy interest behind the new status that has been granted for TVRI. The problem is located on the practice of this kind model of funding on a public service broadcasting that will make the neutrality and independency of this public service broadcasting to be questioned. The remaining questions, Will TVRI come to its own realization to visualize its idealism to be the true public service broadcasting that serves public needs or will TVRI be crushed by the economy politic media policy and serve those who has a power that control the media

Keywords: *media, public service broadcasting, economy politic media, broadcast act*

Pendahuluan

Rentang waktu 13 tahun merupakan jangka waktu yang tidak sebentar bagi TVRI (Televisi Republik Indonesia) dalam proses transformasinya menjadi stasiun penyiaran publik. Operasionalnya semakin terseok-seok semenjak perubahan statusnya menjadi sebuah lembaga penyiaran publik. Mahfum saja dahulu dana yang digelontorkan pemerintah untuk pembiayaan operasionalisasi TVRI saja masih belum cukup, apalagi dengan perubahan statusnya menjadi stasiun penyiaran publik TVRI seperti yang diamanatkan UU No. 32 Tahun 2001 dan PP No.13 Tahun 2005, TVRI diharuskan berdikari mendanai dirinya sendiri.

Tidak hanya TVRI stasiun penyiaran pusat yang mengalami kesulitan sehubungan dengan perubahan statusnya tersebut. Stasiun penyiaran daerahnya yang kini berlabel lembaga penyairan

publik lokal juga ikut terkena imbasnya ditengah era otonomisasi daerah yang semakin mempersempit ruang gerak stasiun penyiaran lokal. Posisi terhimpit yang demikian menjadikan sebuah lembaga media akan kebingungan dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang melilitnya termasuk pengambilan kebijakan sehubungan dengan hutang-hutang perusahaan dan operasionalisasi perusahaan. Hal ini salah satunya telah dibuktikan oleh stasiun TVRI Jateng yang harus mengambil serangkaian keputusan sulit untuk menyelamatkan TVRI mulai dari pengurangan jam siaran, menghapus beberapa program acara unggulan hingga mengurangi dana kesejahteraan karyawan. Langkah ini dilakukan mengingat tidak terdapat pemasukan tetap dari iklan atau sponsor serta kucuran dana APBD yang juga sudah dihentikan (Suara Merdeka Online, 26 September 2008).

Alternatif yang kini ditempuh agar dapat membiayai operasionalisasi stasiun penyiaran ini salah satunya adalah dengan mulai diterimanya *spot* iklan komersial serta menerima bantuan dari pemerintah daerah atau perusahaan-perusahaan besar di daerah. Besarnya dana operasional yang dibutuhkan oleh stasiun penyiaran publik ini pada akhirnya mendorong TVRI pada praktek komersialisasi. Sama halnya juga ketika TVRI daerah mau menerima tawaran dana dari kalangan partai politik dengan membuat sebuah program acara semacam konsultasi publik di televisi, yang mana hal ini telah ditempuh oleh TVRI Stasiun Jawa Tengah pada masa Pemilu 2004 lalu (Sudibyo, 2004: 314). Beberapa *spot* acara juga dijual dengan tujuan komersial, salah satunya dikemas dalam bentuk acara *talkshow* kesehatan. Acara *talkshow* kesehatan tersebut dipandu oleh seorang ahli pengobatan herbal atau alternatif yang dapat menawarkan solusi kesembuhan segala macam jenis penyakit. Ujung dari acara tersebut adalah digiringnya pemirsa untuk menggunakan layanan jasa dan pengobatan dari pakar pengobatan herbal atau alternatif tersebut. Status pegawai TVRI juga menjadi sorotan tersendiri, terlebih dimana sebagian besar pegawainya berstatus pegawai negeri sipil yang digaji oleh pemerintah, juga menjadi sebuah dilema tersendiri dalam pengembangan sumber daya manusia beserta kompetensi yang ada dalam stasiun penyiaran publik ini.

Praktek komersialisasi TVRI ini pada akhirnya akan mendorong operasionalisasi TVRI laiknya sebuah stasiun penyiaran swasta yang lebih menonjolkan tayangan-tayangan yang dapat menghasilkan rating tinggi dan menarik iklan sebanyak-banyaknya. Pada satu sisi langkah kebijakan komersialisasi yang diambil TVRI tersebut dapat dimaklumi mengingat saat ini TVRI sudah tidak lagi di subsidi oleh pemerintah, disamping itu TVRI harus membayar biaya operasionalisasi stasiun penyiarannya setiap harinya dengan dana yang tidak sedikit. Namun di sisi lain, praktek komersialisasi yang ditempuh TVRI ini akan sangat bertentangan dengan peran dan status TVRI sebagai lembaga

penyiaran publik yang mengharuskan stasiun penyiaran publik ini untuk memelihara netralitas dan independensinya dari campur tangan pihak ke tiga, baik itu swasta maupun pemerintah

Kini dalam rentang perjalanannya yang lebih dari satu dekade TVRI masih jauh dari harapan sebagai sebuah stasiun penyiaran publik. Besarnya dana operasionalisasi yang dibutuhkan serta terbatasnya subsidi dari pemerintah menjadi sebuah dilema tersendiri dalam pembiayaan operasionalisasi stasiun penyiarannya ini. Meskipun dalam PP No 11 Tahun 2005 memosisikan TVRI sebagai lembaga pencari keuntungan yang dapat beroperasi layaknya lembaga penyiaran komersial lain dengan menayangkan iklan komersial, musik, sinetron, kuis dan acara *entertainment* lainnya. Perihal sumber pendanaan TVRI tersebut juga ditegaskan kembali dalam PP No. 34 Tahun 2005 Pasal 34 yang menyebutkan sumber pendanaan TVRI berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Peraturan Pemerintah tersebut memudahkan gerak TVRI dalam menggalang perolehan dana operasionalnya sehari-hari.

Satu hal yang kemudian dicemaskan adalah apabila praktek komersialisasi ini menjadi suatu hal yang umum dilakukan oleh stasiun penyiaran publik Indonesia maka mau tak mau TVRI akan berorientasi pasar dan bisa jadi TVRI akan kehilangan esensinya sebagai stasiun penyiaran publik. Hal ini pernah ditegaskan oleh Sudibyo (2004: 314) dalam bukunya *Ekonomi Politik Media Penyiaran* dengan menyatakan bahwa ketika TVRI sepenuhnya bersandar pada pendapatan iklan, kepentingan-kepentingan yang berbasis publik dan komunitas tak akan mendapat prioritas memadai.

Pendekatan ekonomi politik media kemudian digunakan dalam menganalisa langkah kebijakan komersialisasi yang ditempuh oleh TVRI selaku lembaga penyiaran publik. Pendekatan ekonomi politik media memungkinkan dalam menganalisa kecenderungan independensi

media sebagai konsekuensi dari sumber pendanaan sebuah stasiun media massa pada umumnya dan media penyiaran pada khususnya. Sebagaimana dipaparkan oleh Strinati (dalam Burton, 2008: 86), hal ini dikarenakan media mengadopsi determinisme ekonomi yaitu sebuah pandangan yang memandang bahwa kekuatan-kekuatan ekonomi sebagai penyebab terbentuknya konsentrasi kepemilikan media yang kemudian menekankan jenis-jenis kontrol yang dimilikinya terhadap masyarakat dalam produksi ide-ide tentang hubungan sosial. McQuail (2002:82) dalam bukunya *Mass Communication Theory: 4th Edition* juga menambahkan bahwa melalui pendekatan teori ekonomi politik media ini juga akan ditemukan sektor-sektor *audiens* potensial yang lebih sedikit dan lebih kecil serta terabaikan dan seringkali tidak diseimbangkan secara politis dalam media berita.

Perumusan Masalah

TVRI yang dulunya identik sebagai lembaga corong pemerintah, semakin hari semakin mengalami pergeseran seiring dengan besarnya tuntutan operasionalisasi stasiun penyiaran publik ini. Persoalan dana yang serius membuat TVRI memiliki kecenderungan untuk melakukan praktek komersialisasi dan menerima bantuan baik dari pihak-pihak luar. Proses komersialisasi TVRI ini pada akhirnya dapat membuat TVRI kehilangan esensinya sebagai stasiun penyiaran publik sama seperti stasiun penyiaran publik Korea Selatan, KBS (*Korean Broadcast System*) yang menarik lebih banyak proporsi iklan (56%) dalam anggaran mereka. Konsekuensinya KBS banyak mengeliminasi beberapa program budaya yang dinilai *berating* rendah dan lebih banyak menonjolkan tayangan komersial yang menarik. Hal ini ditempuh dengan keyakinan bahwa rating akan menarik sponsor perusahaan untuk beriklan di stasiun media penyiaran tersebut. Penerimaan sponsor atau bantuan dari pihak luar membuat TVRI menjadi terkesan tidak independen dan terlihat seperti humas pemerintah atau marketing

komunikasi sebuah perusahaan tertentu.

Mungkin saja saat ini TVRI tengah mencoba mengembangkan sistem operasionalisasi lainnya sebuah stasiun penyiaran komersial mengingat saat ini TVRI juga tengah berjuang lepas dari ketergantungannya pada subsidi APBN/ APBD pemerintah selama ini. Stasiun penyiaran publik ini memiliki problematika dan masalah dana operasionalisasi yang harus mereka pecahkan. Kini setelah transformasinya selama hampir satu dekade lebih menjadi stasiun penyiaran publik di Indonesia, apakah TVRI dapat memperjuangkan independensi serta *balancing* mereka terhadap kinerja pemerintah ditengah status karyawan mereka yang notabene pendapatan setiap bulannya masih menginduk pada pemerintah? Serta apakah arus komersialisme telah menggerus prinsip melayani kepentingan publik yang diembannya seiring dengan meningkatnya tuntutan operasionalisasi finansial yang cukup besar?

Pembahasan

Idealisme sebagai stasiun penyiaran publik:

Sejak perubahan statusnya menjadi stasiun penyiaran publik, LPP TVRI baik di pusat maupun daerah masih terus berbenah diri untuk menjadi sebuah stasiun penyiaran publik yang dapat mengakomodir dan memberikan pelayanan informasi kepada publik sebagai audiensnya. Sebagaimana diketahui, status TVRI baik itu stasiun penyiaran pusat maupun daerah sebelum era penyiaran publik, selama berpuluh-puluh tahun bisa dipastikan lebih mengarah pada model penyiaran pemerintah. Banerje dan Seneviratne (2009: 14-15) mendeskripsikan TV pemerintah sebagai sebuah sistem penyiaran yang dikendalikan oleh pemerintah dan sistem penyiaran ini menampilkan fungsi pelayanan publik tertentu. Mereka dikendalikan oleh pemerintah, memiliki model pembiayaan yang hampir sama dengan penyiaran publik yang juga dibiayai oleh pemerintah. Bedanya mereka memiliki sedikit independensi dan kenetralan dalam pembuatan program dan pengelolaan manajemennya.

Putra (2006: 101) menambahkan bahwa dalam televisi pemerintah terdapat kecenderungan terjadinya distorsi informasi karena isi siaran lebih mengutamakan kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan publik. Program-program pemerintah lebih banyak mendominasi isi siaran sehingga televisi kemudian menjadi alat propaganda pemerintah

Banerje dan Seneviratne (2005: 17) menegaskan bahwa sangatlah penting untuk menggarisbawahi sebuah fakta bahwa sistem penyiaran yang dimiliki pemerintah tidak dapat disebut sebagai PSB. Ada salah pengertian yang sangat besar yang menjelaskan bahwa PSB dan stasiun penyiaran pemerintah adalah sama. Kesalahan ini bermula dari fakta yang menyebutkan bahwa di muka bumi ini hanya ada beberapa stasiun penyiaran yang benar-benar asli PSB sedangkan sebagian besar sisanya adalah stasiun penyiaran milik pemerintah. Apalagi jika ditambah dengan membandingkan stasiun penyiaran pemerintah dengan stasiun penyiaran komersial maka stasiun penyiaran pemerintah pun akan lebih dianggap berorientasi melayani publik, yang mana hal ini malah menjadikan sebuah kebingungan yang lebih luas lagi antara stasiun penyiaran publik dengan sistem penyiaran pemerintah.

Tidaklah mudah bagi TVRI untuk menerjemahkan dalam waktu yang singkat mengenai konseptualisasi dan operasionalisasi sebagai sebuah stasiun penyiaran publik karena TVRI telah lama lekat mendalami perannya sebagai corong pemerintah. Sebenarnya apakah itu stasiun penyiaran publik? Definisi mengenai stasiun penyiaran publik atau *Public Service Broadcasting* (PSB) mengacu pada sebuah layanan penyiaran non profit, tidak komersial yang ditujukan untuk masyarakat dan layanan penyiaran ini menyediakan seperangkat program yang lengkap untuk masyarakat. Secara teori PSB bertanggung jawab terhadap publik, memiliki jarak dengan pemegang kekuatan dominan politik serta tidak bergantung pada pasar untuk menentukan programnya (McChesney, 2008: 446).

Tidak adanya standar baku mengenai

definisi penyiaran publik di setiap negara menyebabkan definisi PSB tidak selalu punya satu makna. Setiap negara menganut model penyiaran yang berbeda tergantung pada kondisi politik, teknologi dan lingkungan ekonominya. Pada beberapa negara, TV publik adalah TV yang diasosiasikan dengan negara dan dipakai sebagai instrument pemerintah pusat. Ini misalnya terjadi di negara-negara komunis atau eropa timur sebelum runtuhnya tembok Berlin. Sedangkan di sejumlah negara lain, TV Publik adalah TV yang dimiliki oleh negara, namun dengan pengelolaan yang bebas dari campur tangan negara atau pemerintah. Anggaran untuk pengelolaannya memang berasal dari pemerintah, tetapi stasiun TV yang ada tidak bertanggungjawab kepada pemerintah. Para pengelola TV yang ada bertanggungjawab kepada publik. Beberapa contohnya yaitu BBC di Inggris, NHK di Jepang atau ABC di Australia. Di tempat lain TV Publik adalah TV komunitas, tv publik adalah televisi yang dibangun dan dikelola oleh komunitas sebagai bentuk alternatif terhadap TV komersial dan TV pemerintah.

Stasiun penyiaran publik memiliki prinsip-prinsip pengoperasian yang menjadi patokan operasionalisasi kegiatan mereka. Seperti yang dijabarkan oleh Marc Raboy dan Michael Tracey (dalam Putra, 2006: 100), prinsip prinsip tersebut meliputi: (1) Akses *universal* yang artinya TV publik melayani semua kelompok masyarakat tanpa melihat status sosial ekonomi dan jarak geografis yang ada; (2) Memiliki daya tarik yang lebih universal yaitu TV publik menyiarkan acara yang lebih beranekaragam dengan mempertimbangkan aspek keanekaragaman kultur yang ada; (3) Memberikan perhatian terhadap kaum minoritas. Hal ini dapat diartikan bahwa siaran TV publik tidak hanya ditunjukkan untuk kelompok dominan atau mayoritas, tetapi juga memberi perhatian yang cukup besar terhadap kelompok minoritas; (4) Berkomitmen untuk pendidikan publik, diman TV publik sangat berkepentingan dengan usaha peningkatan pendidikan publik; (5) Menjaga jarak dengan seluruh kepentingan

baik politis, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu TV publik adalah TV yang independen; (6) TV Publik berkompetisi untuk menghasilkan program yang berkualitas atau baik bukan memperoleh rating; (7) Arahan yang diterima lebih bersifat memberi kebebasan bagi produser TV publik; (8) TV publik sebagai *public sphere* yaitu sebagai tempat atau ruang publik tempat berdebat rasional tanpa restriksi dari kepentingan politis, ekonomi, agama dan tentang persoalan bersama dapat berlangsung

Regulasi di Indonesia kemudian mendefinisikan konsep TV publik tersebut sebagai sebuah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU penyiaran No. 32 Tahun 2002. TV Publik di Indonesia merujuk pada TVRI Pusat dan TVRI Stasiun penyiaran daerah sebagai stasiun penyiaran publik lokal. Penjabaran dan pengaturan lembaga penyiaran publik ini tertuang dalam PP No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran publik dan dalam PP No. 13 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.

Sejak bertransformasi menjadi stasiun penyiaran publik, beberapa perubahan signifikan mewarnai sejumlah bidang dalam TVRI mulai dalam bidang produksi berita sampai bidang pengelolaan dana. Secara teknis TVRI baik stasiun penyiaran pusat maupun daerahnya telah berusaha untuk memenuhi kriteria yang dipersyaratkan untuk menjadi PSB. Kini, TVRI berusaha untuk mengcover kepentingan publik dengan mengetengahkan pilihan-pilihan beritanya yang katanya telah berorientasi publik. Meskipun saat ini pun masih banyak berita mengenai pemerintah yang juga diliput oleh TVRI, namun TVRI baik stasiun penyiaran pusat maupun daerahnya mengungkapkan bahwa hal ini adalah wajar seperti yang dikutip dari Hariono selaku Direktur Utama LPP TVRI dalam sebuah makalah yang dipresentasikannya pada rapat kerja TVRI bahwa bab dalam salah

satu definisi mereka tentang publik menyebutkan bahwa presiden, wapres dan parlemen yang dipilih secara demokratik merupakan bagian dari publik. Salah satu hak publik adalah hak untuk mengetahui tentang apa saja yang dilakukan oleh presiden, wapres dalam hal ini yang biasa kita sebut dengan pemerintah, serta parlemen sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas kepublikan, setelah lembaga-lembaga itu dipilih oleh publik. Selain itu Hariono juga berasumsi bahwa antara lembaga publik dengan departemen pemerintah memiliki kesamaan misi kepublikan tanpa menjadi tergantung dan tidak netral atau tidak independen. Pemerintah dan parlemen di satu sisi adalah *stakeholders*, di sisi lain adalah mitra strategis atau *strategic alliance* bagi LPP TVRI .

Sebagai stasiun penyiaran publik seharusnya TVRI mengembangkan prinsip-prinsip operasionalisasi TV Publik sebagaimana yang diungkapkan Tracey dan Raboy dalam penjelasan sebelumnya. Sehingga TVRI sebagai TV publik dapat memaksimalkan fungsinya sebagai media yang melayani kepentingan publik dengan secara regular menyertakan gagasan-gagasan yang berada di luar batas konsensus yang telah ditetapkan. Melalui cara pandang ini maka media masa dapat menjadi tempat dimana gagasan-gagasan lama dapat dikaji ulang kembali dan gagasan-gagasan baru dapat dapat muncul dan diperdebatkan. Selain itu kepentingan publik dapat ditingkatkan oleh sebuah system media yang menampilkan keragaman sudut pandang dan cerita, memberikan masyarakat jendela multikultural dan multiperspektif dalam dunia mereka. Keanekaragaman disini juga mengacu tidak hanya pada perbedaan dalam ras, kelas, gender tetapi juga dalam substansi politik atau perbedaan ideologis (Croteau dan Hoynes, 2001: 226-227)

Kebijakan Ekonomi Politik stasiun penyiaran Publik:

Ekonomi politik media sebagaimana yang diyakini McChesney(2008:12) adalah sebuah bidang yang berusaha menghubungkan tentang bagaimana media dan sistem komunikasi serta

kontennya dibentuk oleh kepemilikan, struktur pasar, dukungan komersial, teknologi, praktek perubahan dan kebijakan pemerintah. Ekonomi politik media kemudian menghubungkan media dengan sistem komunikasi untuk mengetahui bagaimana sistem ekonomi dan politik bekerja dan bagaimana kekuatan sosial dilaksanakan dalam masyarakat.

Konsep yang sama tentang ekonomi politik media juga dikemukakan oleh McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory: 4th Edition* (2002:82) dimana ia menambahkan bahwa dari sudut pandang ekonomi politik media, institusi media dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki hubungan dekat dengan sistem politik. Karakter utama dari apa yang dihasilkan media secara garis besar dapat dinilai melalui pertukaran nilai dari muatan isi yang berbeda-beda, keadaan berada dibawah tekanan kondisi agar memperluas pasar dengan mendasarkannya pada kepentingan ekonomi dari pemilik dan pengambil keputusan. McQuail dalam bukunya tersebut juga menjelaskan bahwa kepentingan ini berhubungan dengan kebutuhan akan keuntungan yang diperoleh dari beroperasinya media dan pada relativitas keuntungan dari cabang perdagangan lainnya sebagai hasil dari kecenderungan ekonomi dan proses integrasi vertikal dan horizontal. Konsekuensi adalah hal yang diamati terutama pada berkurangnya independensi sumber media. Konsentrasi pada pasar yang lebih besar, penghindaran resiko dan pengurangan investasi dalam tugas media yang kurang menghasilkan keuntungan. McQuail juga menyebutkan bahwa melalui teori ekonomi politik media ini akan ditemukan sektor-sektor audiens potensial yang lebih sedikit dan lebih kecil serta terabaikan dan seringkali tidak diseimbangkan secara politis dalam media berita.

Melalui sudut pandang ekonomi politik media kita bisa melihat bagaimana posisi TVRI sebagai sebuah stasiun penyiaran publik apakah telah beroperasi selainya stasiun penyiaran publik yang mengcover kepentingan publik sebagai audiensnya atau malah tergerus oleh kepentingan pihak-pihak yang ingin

mengendalikan media demi mencapai tujuan mereka? Pertama, Ada beberapa point yang saat ini tidak bisa sepenuhnya dipenuhi oleh TVRI stasiun penyiaran pusat dan lokal untuk menjadi televisi publik sepenuhnya, terutama dalam keterkaitannya dengan pemerintah yang menyokong sebagian besar kinerja TVRI sebagai stasiun penyiaran. Lihat saja bagaimana stasiun penyiaran ini menjadi kalang kabut ketika dana operasional mereka dibekukan oleh DPR lantaran kasus korupsi pengadaan acara siap siar TVRI di tahun 2012. Akibat pembekuan dana operasional TVRI ini, stasiun penyiaran lokal Bengkulu dan Kalimantan Barat mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan mampu untuk melanjutkan siaran operasionalnya di tahun 2014 (Tribun News.com, 8 Januari 2014 & 13 Maret 2014)

Diakui atau tidak model pendanaan TVRI sebagian masih bergantung pada negara. Besarnya peran negara dalam sebuah stasiun penyiaran dapat kita pahami melalui pernyataan Marx (dalam Masduki, 2007 : 93) yang menyebutkan bahwa negara memang mempunyai kepentingan sendiri sebagai lembaga yang tidak selalu dikontrol kaum borjuis. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut sistem kapitalis, negara memiliki kepentingan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kelas pemilik kapital dalam penyiaran lewat kerjasama untuk saling mengontrol antar negara dan kegiatan ekonomi. Negara memang memiliki identitas sendiri dan mampu bertindak secara independen dalam memelihara serta mempertahankan tata sosial, namun kelas ekonomi dominan itulah yang akhirnya menerima manfaat terbesar. Menyatunya kaum kapitalis dengan negara, menyebabkan liberalism kapitalisme semakin tidak terbandung lagi. Penyatuan antara kapitalis dan negara akan memperkuat kelas sosial penguasa untuk selanjutnya menguasai kelas-kelas lain.

Penjabaran Marx tersebut membuat kita menjadi paham mengenai kecenderungan pemerintah yang tidak ingin kehilangan kendali dalam mengatur ranah penyiaran. Inilah yang dialami oleh TVRI baik stasiun penyiaran pusat maupun daerahnya, meski kini statusnya

telah menjadi stasiun penyiaran publik. Secara tidak langsung hal ini diproyeksikan dalam kebijakan yang tertuang dalam pengaturan undang-undang penyiaran publiknya. Status sebagai stasiun penyiaran publik toh tetap tidak mampu membuat TVRI untuk menawarkan sebuah sudut pandang yang lebih kritis terhadap kinerja ataupun kebijakan yang dihasilkan oleh instansi-instansi pemerintah tersebut. Suara TVRI sebagai stasiun penyiaran publik seakan tenggelam tergilas oleh suara-suara pemerintah dan instansi-instansi yang mewakili mayoritas sumber dana utama dalam penyiaran mereka. Suara – suara di luar arus utama tadi memang ditampung TVRI melalui segmen interaktif dalam paket acara berita TVRI atau dalam program-program acara talk shownya. Namun, sayangnya TVRI hanya berani memposisikan dirinya sebagai mediator dengan pihak-pihak arus utama tadi tanpa berani mengambil sikap kritis sebagai dukungan terhadap publik yang sedang bermasalah dengan pihak-pihak tersebut.

Lantas jika praktek operasionalisasi TVRI semacam ini, kemudian apa yang membedakan operasionalisasi TVRI dengan praktek penyiaran TVRI di masa orde baru? Bagi TVRI langkahnya ini ditafsirkan sebagai bagian dari komitmennya sebagai TV Publik yang memiliki kewajiban untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang belum sampai ke masyarakat. Sekilas TVRI mungkin akan terlihat menjadi penyeimbang ditengah hingar bingarnya media swasta yang bersifat oposan terhadap pemerintah (walaupun tidak selalu mereka bersikap demikian) dengan menjadi media informatif yang menginformasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang belum diketahui masyarakat serta menampilkan sisi lain yang tidak diketengahkan oleh TV swasta. Apalagi mereka menyebutkan bahwa acuan yang mereka gunakan selalu berkiblat pada Perilaku Pedoman Penyiaran dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Padahal, kenyataan yang terjadi adalah secara tidak langsung masyarakat kembali disuguhkan agenda program pemerintah yang telah tersusun rapi.

Kecenderungan TVRI dalam pengambilan

keputusannya ini dapat kita pahami melalui apa yang dinyatakan Edward Herman (dalam Downing, Mohammadi, Sreberney-Mohammadi, 1990: 81) dalam bukunya *Media in The US Political Economy* yang menggambarkan bahwa media massa memiliki suatu hubungan yang dekat dengan struktur kekuasaan, baik itu dalam skala nasional ataupun lokal. Hal ini disebabkan oleh faktor modal dan kepentingan yang saling menguntungkan satu sama lain. Pada satu sisi pemerintah dan narasumber terpercaya ini membutuhkan media untuk memelihara gambaran obyektif tentang mereka tetapi sebagiannya juga untuk melindungi diri mereka dari kritik penyimpangan dan ancaman fitnah yang serius. Sedangkan bagi media, informasi terutama dari sumber yang terpercaya dapat mengurangi biaya untuk liputan investigatif. Media memandang bahwa material dari sumber yang tidak terpercaya hanya akan menimbulkan kritik, ancaman, serta memerlukan kehati-hatian dan biaya pengecekan yang mahal. Namun, Herman mengingatkan bahwa jika narasumber memiliki kekuasaan yang sangat besar maka narasumber ini memiliki potensi yang besar untuk menekan jurnalis ke luar dari liputan berita jika mereka tidak bersikap kooperatif, yang lebih parah lagi narasumber ini dapat memanipulasi media agar mengikuti agenda dari struktur kekuasaan.

Akhirnya yang muncul kemudian adalah kekhawatiran tentang bias kepentingan TVRI sebagai penyiaran publik yang kembali menjadi megafon pemerintah. Praktek semacam ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan menghilangkan *diversity voices* yang coba diketengahkan oleh TV publik. . Bermain aman dengan menjadi media informatif yang menginformasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah serta hanya mengandalkan pihak tertentu untuk jenis liputan investigatif malah akan semakin menguatkan dugaan ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan stasiun penyiaran publik ini. Melihat posisi TVRI baik stasiun pusat maupun lokalnya saat ini sama saja dengan melihat lembaga penyiaran yang dikendalikan negara untuk melayani kepentingan publik.

Operasionalisasi praktek semacam tentunya ini tidak akan merugikan TVRI pada umumnya malahan sebagai bonusnya mereka akan selalu mendapatkan proteksi dari negara dalam hal ini pemerintah terkait. Pada akhirnya pandangan bahwa TVRI adalah televisi yang independen dan netral termentahkan dengan praktek semacam ini. Namun, ketakutan terhadap serangan keberpihakan membuat TVRI menutupi praktek semacam ini dengan berusaha menghadirkan berita-berita penyeimbang yang mereka rasa telah mengakomodir kepentingan publik.

Kedua, Status pegawai TVRI yang masih PNS juga membuat sebagian masyarakat merasa ambigu dengan keseriusan TVRI dalam menjalankan fungsinya sebagai stasiun penyiaran publik. Berstatuskan pegawai abdi negara dapat menimbulkan bias kepentingan dari orientasi program acara dan pemberitaan informasi yang berusaha diwujudkan TVRI sebagai TV Publik. Selain itu, status ini akan membingungkan masyarakat dalam membedakan posisi TVRI dalam kapasitasnya sebagai stasiun penyiaran publik atau dalam kapasitasnya sebagai stasiun penyiaran pemerintah. Apalagi posisi pegawai TVRI baik pusat maupun daerah berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) menjadikan mereka mau tak mau mengikuti arus kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Akibatnya, mereka merasa tidak bebas dan merasa dibatasi dalam melakukan setiap gerakan.

Ketiga, lemahnya TVRI dari segi pendanaan membuat TVRI secara keseluruhan baik di tingkat pusat maupun stasiun penyiaran daerahnya, membuat TVRI sama-sama termarginalkan, jauh dari signifikan bahkan tidak juga dominan bila dibandingkan dengan komponen dari media-media penyiaran komersial lainnya. Kosekuensinya dalam segi penyiaran TVRI menjadi lebih sering menampilkan acara *re-run* dari liputan-liputan terdahulunya, dimana stasiun penyiaran lokalnya banyak *me-rely* program acara stasiun penyiaran pusat untuk program siarannya dalam siaran per harinya. Itupun waktu operasional penyiaran untuk stasiun penyiaran lokalnya hanya beroperasi selama

beberapa jam per harinya. Sangat disayangkan juga dalam praktek siarannya, bahwa sebagian besar program acara TVRI stasiun penyiaran lokal masih banyak di dominasi oleh program stasiun penyiaran pusatnya. Hal ini tentu saja dapat mengurangi pengembangan potensi keragaman dan kekayaan daerah yang coba diusung oleh stasiun penyiaran lokal. Dana jualan yang menjadi salah satu pertimbangan penerapan pola program siaran pada sebagian besar pengadaan program acara siaran di stasiun TVRI penyiaran pusat maupun lokal. Faktor kurangnya SDM beserta infrastruktur yang memadai, turut ikut andil dalam mempengaruhi kualitas program siaran TVRI.

Pemasalahan tersebut pada akhirnya membuat TVRI harus berdikari mandiri dengan mencari sumber pendanaan lain, meskipun idealnya, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya tidak diposisikan untuk menerima iklan ataupun menggunakan praktek jurnalisme untuk mencari keuntungan. Bahkan memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan pemerintah. Apa daya, keterbatasan biaya yang akhirnya memaksa TVRI untuk bersimbiosis dengan pemerintah dan pemberi sponsor dalam menyelenggarakan operasionalisasi siarannya. Tentu saja prinsip ini bertentangan dengan prinsip operasionalisasi televisi publik yang menuntut komitmen untuk menjaga jarak dengan seluruh kepentingan baik politis, ekonomi, maupun sosial. Namun, hal ini mau tak mau memang tak terhindarkan karena di satu sisi mereka masih membutuhkan negara sebagai penunjang mereka dan membutuhkan pasar untuk kelangsungan operasionalisasi siarannya. Disamping itu pemerintah juga telah melegalkan pencarian dana di luar APBN melalui penetapan PP dan UU penyiarannya.

Konsekuensi umum dari hal ini kemudian adalah diizinkan para pengiklan dan kaum kapitalis untuk menjadi pendonor keuangan dan memperbolehkan mereka untuk mengarahkan penyiaran. Melalui susut pandang ini, dapatlah kita asumsikan bahwa model pendanaan TVRI pada saat sekarang ini juga relatif dominan dikendalikan oleh kekuatan pasar selain

juga bergantung pada subsidi pemerintah. Terungkapnya kasus korupsi pengadaan acara siap siar oleh Direktur Program dan Bidang LPP TVRI, Irwan Hendarmin di tahun 2012 membuktikan bahwa praktek pengadaan program acara di TVRI lainnya sebuah sistem mekanisme pasar yang melibatkan mekanisme jual beli dimana ada *supply* dan *demand* dengan pihak ketiga yang mampu memberikan margin profit besar.

Hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru karena praktek yang hampir sama sebenarnya juga pernah dilakukan oleh TVRI stasiun penyiaran lokal Jawa Tengah di tahun 2004 dengan membuka peluang bagi partai politik untuk melakukan semacam konsultasi publik di televisi. Dua partai yang telah memanfaatkan peluang ini adalah PDIP dan PAN. Meskipun pada akhirnya Effendi Anwar selaku Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah pada waktu itu harus menanggung kecaman sebagai “orang merah” karena pernah memberi kesempatan PDIP untuk tampil di TVRI Jawa Tengah (Sudibyo, 2004; 314). Peristiwa tersebut terulang kembali dengan ditayangkannya konvensi calon presiden partai demokrat di TVRI pada tahun 2013 lalu. TVRI menerima banyak kritik dari berbagai pihak atas keputusannya tersebut serta harus menanggung somasi yang dilayangkan oleh KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) karena dianggap melanggar perundang-undangan terkait siaran tunda acara konvensi partai demokrat tersebut (Tribunnews Online, 21 September 2013).

Terlalu dominannya porsi pendapatan di luar dana lisensi baik itu dari pemerintah, pemberi bantuan dana maupun dari iklan atau *sponsorship* memicu sebuah kekhawatiran akan independensi, kenetralan, kualitas dan originalitas penyiaran publik terutama dalam memberitakan persoalan-persoalan strategis yang berkaitan dengan publik. Secara jelas persoalan ini digambarkan oleh McKinsey (1999 dalam Namsu, 2007) melalui penelitiannya yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara model pendanaan stasiun penyiaran publik dengan kualitas keseluruhan dari masing-masing pasar penyiaran nasional. Penelitiannya

menunjukkan bahwa jika stasiun penyiaran publik terlalu menggantungkan pendapatannya pada iklan, maka mereka memiliki kemungkinan terbesar untuk kehilangan ciri khusus mereka sebagai stasiun penyiaran publik.

Gurevitch, Curran & Woolacott (1990: 16) dalam uraiannya menyatakan bahwa disadari atau tidak, organisasi media tempat jurnalis bernaung bukanlah sebuah sistem organisasi yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan serangkaian institusi yang memiliki hubungan dekat dengan struktur kekuasaan dominan melalui kepemilikan, regulasi legal, nilai-nilai yang tersirat dalam ideologi profesional media dan struktur serta konsekuensi ideologis dari model pengumpulan berita yang berlaku. Jadi, bahaya terbesar dan ancaman serius terhadap independensi penyiaran publik bila dikuasai pemerintah dan para pendonor serta pemasang iklan yang memiliki hubungan dengan sejumlah partai politik tertentu.

Mengapa independensi sangat penting dalam sebuah penyiaran publik? Jawaban yang pasti adalah karena sebuah stasiun penyiaran publik yang independen dapat memperluas cakrawala dari wacana publik dengan melakukan pelayanan sebagai dasar sudut pandang, gagasan dan presentasi budaya yang sebelumnya tidak pernah dikumandangkan dalam media penyiaran komersial dengan menyediakan akses pada masyarakat akan sebuah gagasan ide yang besar, stasiun penyiaran publik dapat membantu warga masyarakat untuk menjadi lebih aktif dalam arena kehidupan publik yang lain (Croteau & Hoynes, 2001: 226-227).

Oleh karena itu sistem pendanaan penyiaran publik harus dibuat benar-benar independen. Croteau dan Hoynes menyarankan dana penyiaran publik harus dioperasikan melalui prinsip-prinsip; (1) meminimalisir ketergantungan penyiaran publik akan dana parlemen setiap tahunnya; (2) mendirikan sebuah dana perwalian dengan aliran dan regular yang terpisah secara politis; (3) melarang pendanaan yang berasal dari perusahaan pribadi untuk produksi program; (4) membiayai sistem penyiaran publik melalui kepentingan komersial

yang menguntungkan dari penggunaan gelombang udara publik

kredibilitasnya sebagai stasiun penyiaran publik milik masyarakat.

Penutup

Angan-angan untuk mewujudkan TVRI sebagai sebuah stasiun penyiaran publik memang masih panjang, namun bukan berarti hal tersebut mustahil untuk diwujudkan. Silang sengkabut yang melanda TVRI baik stasiun pusat maupun lokalnya mengundang keprihatinan tersendiri terhadap perkembangan stasiun penyiaran publik ini. Bantuan operasional maupun finansial pihak ketiga baik dari pemerintah maupun dari pihak yang memberi sokongan dana besar bagi TVRI mau tak mau membuat TVRI terseret dalam praktek ekonomi politik media. Ujungnya adalah intervensi yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak pemberi sponsor dalam kebijakan redaksional TVRI. Kondisi yang serba tak menguntungkan bagi TVRI ini, membuat stasiun penyiaran publik ini tidak memiliki pilihan lain atau alternatif untuk bertahan hidup selain dengan mengakomodir beberapa kepentingan tertentu baik dari pemerintah ataupun dari pihak pemberi sponsor. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip tv publik yang independen, netral dan tidak komersial.

Pada akhirnya cita-cita dalam mewujudkan TVRI sebagai sebuah stasiun penyiaran publik yang independen, netral dan tidak komersial masih jauh dari realita. Kondisi TVRI yang termarginalkan bahkan tidak juga dominan membuatnya hampir mustahil untuk bertahan hidup ditengah maraknya variasi tayangan dan program acara dari media-media komersial lainnya. Namun setidaknya ada hal yang bisa dilakukan oleh TVRI untuk membuktikan komitmen mereka sebagai TV publik dan meraih kembali kepercayaan publik sebagai audiens utamanya dengan lebih banyak melibatkan publik beserta komunitas mereka dalam operasionalisasi siarannya. Meskipun kemungkinannya sangatlah kecil, namun penjagaan jarak atau afiliasi dengan pemerintah atau pemilik sumber dana besar akan sangat membantu TVRI dalam menampilkan

Daftar Pustaka

Buku

- Banerjee, Indrajit and Kalinga Seneviratne. (2005). *Public Service Broadcasting: A Best Practices Source Book*. New York: AMIC, UNESCO
- Berger. Arthur Asa. (1999). *Media Analysis Technique*. London: SAGE Publications
- Burton, Graeme. (2007). *Membincangkan Televisi: Sebuah Pengantar Kepada Studi Televisi*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- (2008). *Media dan Budaya Populer*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- (2008). *Yang Tersembunyi di Balik Media: Sebuah Pengantar Kepada Kajian Media*. Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Croteau, David and William Hoynes. (2001). *The Business of Media: Corporate Media and The Public Interest*. Boston: Pine Forge Press.
- Downing, Jhon, Ali Mohammadi and Anabelle Srenberney-Mohammadi (1990). *Media in The US Political Economy*. London: SAGE Publications.
- Fahmi, A. Alatas. (1997). *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Komunikasi Masa Depertamen Penerangan.
- Gurevitch, Michael, James Curran and Jane Woolcott. (1990). *Culture, Society and Media*. London: Routledge.
- Masduki. (2007). *Regulasi Penyiaran: Dari Otoriter ke Liberal*. Yogyakarta: LKIS.
- McChesney, Robert. W, (2008). *The Political Economy of Media: Enduring Issues, Emerging Dilemmas*. New York: Monthly Review Press.
- McQuail, Dennis. (2002). *McQuail's Mass Communication Theory: Fourth Edition*. London: SAGE Publications.
- Pawito (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS.

Schechter, Danny. (2007). *Matinya Media: Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Setyawati, E. Yuningtyas dkk. (2008). *Diskursus Relasi Masyarakat, Bisnis dan Media*. Yogyakarta: PISS Printing.

Straubhaar, Joseph, Robert Larosse and Lucinda Davenport. (2002). *Media Now: Understanding Media (Third Edition)*. United States of America: Wadsworth Cengage Learning.

Strinati, Dominic. (2007). *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Sudibyo, Agus. (2004). *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: LKIS

Jurnal

Arifianto, S. (2006). *Televisi Sebagai Representasi Budaya Masyarakat*. Jurnal IPTEK-KOM Vol 8 Nomor 2.

Mudjiyanto, Drs. Bambang. (2006). *Pengantar Diskusi Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jurnal Semi Ilmiah Populer "Komunikasi Massa" Vol 2 Nomor 1.

Putra, I Gusti Ngurah. (2006). *TV Publik di Indonesia: Masalah Masa Lalu, Potensi dan Tantangan ke Depan*. Jurnal IPTEK-KOM Vol 8 Nomor 2.

Makalah, Skripsi

Hariono, (2008, Desember 10). *Menyamakan Persepsi*. Makalah (Disajikan pada Rapat Kerja TVRI) Jakarta

Namsu, Park. (2007, May 24). *Challenge of The Public Service Broadcasting to New Era Media: The Case of Korean Broadcasting System (KBS)*. Makalah (Disajikan dalam Rapat Tahunan International Communication Association) TBA, San Fransisco

Peraturan Perundangan

PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

UU No. 32 Tahun 2002 tentang UU Penyiaran Republik Indonesia

Sumber Internet

Sinar Harapan (2008, diakses 26 September). "TVRI. Persero dan Masa Depan TV Publik," berita online (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0304/25/opi02.html>)

Suara Merdeka (2008, diakses 26 September). "TVRI Dilanda Krisis Keuangan," berita online (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0412/nas11.htm>)

Suara Merdeka (2008, diakses 26 September). "TVRI Jateng Nasibmu Kini (1): Ibarat Kapal yang Mau Tenggelam," berita online (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/20/kh01.htm>)

Tempo (2009, diakses 17 Juni). "Direktur Program dan Pemberitaan TVRI di Nonaktifkan," berita online (<http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2007/03/23/brk,20070323-96227.id.html>)

Tempo Interaktif (2009, diakses 17 Juni). "Kuis Pecat Cepat TVRI," berita online (<http://www.tempointeraktif.com/id/arsip/2004/02/16/OPI/mbm.20040216.OPI88961.id.html>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). "Online: Direktur Keuangan TVRI Ditetapkan sebagai Tersangka," berita online (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/29/direktur-keuangan-tvri-ditetapkan-sebagai-tersangka>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). "Kejaksaaan Agung Tahan Mantan Direktur Program dan Bidang LPP," berita online (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/05/19/kejaksaaan-agung-tahan-mantan-direktur-program-dan-bidang-lpp-tvri>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). "Kejaksaaan Agung Periksa Tiga Pejabat TVRI," berita online (<http://www.tribunnews.com/nasional/2015/03/12/kejaksaaan-agung-periksa-tiga-pejabat-tvri>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). "TVRI Bengkulu Hanya Mampu

Siaran Sampai Maret 2014,” berita online (<http://www.tribunnews.com/regional/2014/01/08/tvri-bengkulu-hanya-mampu-siaran-sampai-maret-2014>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). “Kasus TVRI Istimewakan Tayangan Konvensi Partai Demokrat Jangan Terulang,” berita online <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/23/kasus-tvri-istimewakan-tayangan-konvensi-demokrat-jangan-terulang>

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). “Syarief Hasan: Tayangan Konvensi Capres Demokrat Inisiatif TVRI,” berita online (<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/17/syarief-hasan-tayangan-konvensi-capres-demokrat-inisiatif-tvri>)

Tribun News (2015, diakses 10 Desember). “TVRI Bantah Mendapat Duit dari Partai Demokrat”, berita online <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/09/18/tvri-bantah-mendapat-duit-dari-partai-demokrat>